



**ETIKA DISKURSUS JÜRGEN HABERMAS DAN
RELEVANSINYA BAGI PENYELESAIAN KONFLIK
VERTIKAL DI PAPUA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat**

Oleh

SEBASTIANUS IYAI

NPM: 21.75.7172

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

2025

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Sebastianus Iyai
2. NPM : 21.75.7172
3. Judul Skripsi : Etika Diskursus Jürgen Habermas dan Relevansinya Bagi Penyelesain Konflik Vertikal di Papua

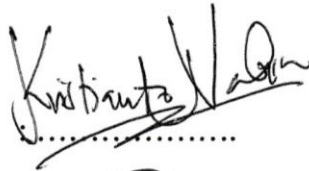
4. Pembimbing:

1. Dr. Yosef Keladu

(Penanggung Jawab)

: 

2. Kristianto Ratu Marius Nabon, S.Fil., M.A.

: 

3. Dr. Puplius Meinrad Buru

: 

5. Tanggal diterima

: 05 Maret 2024

6. Mengesahkan:

Wakil Rektor I



Dr. Yosef Keladu

7. Mengetahui

Rektor IFTK Ledalero

Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

LEMBARAN PENGESAHAN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian
dari Syarat-syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat

Pada

28 Mei 2025

Mengesahkan

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Rektor



Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Yosef Keladu
2. Kristianto Ratu Marius Nabén, S.Fil., M.A.
3. Dr. Puplius Meinrad Buru

.....
.....
.....

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sebastianus Iyai

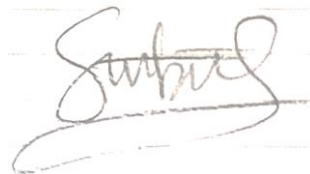
NPM : 21.75.7172

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, 10 Mei 2025

Yang menyatakan

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Sebastianus Iyai', written over a light blue horizontal line.

Sebastianus Iyai

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai civitas akademika Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sebastianus Iyai

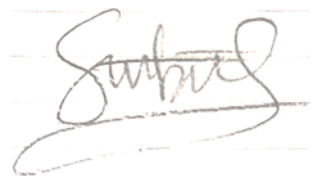
NPM : 21.75.7172

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: ETIKA DISKURSUS JÜRGEN HABERMAS DAN RELEVANSINYA BAGI PENYELESAIAN KONFLIK VERTIKAL DI PAPUA, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero, Maumere

Pada tanggal : 10 Mei 2025

Yang menyatakan



Sebastianus Iyai

KATA PENGANTAR

Papua adalah bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Papua telah terintegrasi ke dalam NKRI sejak tahun 1969 melalui suatu proses yang dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Namun, mayoritas masyarakat Papua menilai proses integrasi tersebut memiliki sejumlah kejanggalan. Bagi mereka PEPERA tersebut penuh manipulasi dan cacat. Alasannya karena PEPERA tersebut berlangsung di bawah ancaman dan todongan laras senjata. Tekanan-tekanan tersebut sudah dipublikasikan melalui suatu dokumen rahasia yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Salah satu ungkapan dalam dokumen tersebut tertulis: “Kamu harus memilih bergabung dengan Indonesia. Kalau tidak, kamu harus ditembak mati atau akan dibakar hidup-hidup.” Selain itu, PEPERA tidak mengikuti praktik hukum internasional di mana dalam proses penentuan ditekankan satu orang satu suara. Namun dalam proses penentuan itu, Indonesia menggunakan sistem perwakilan. Sebagai perwakilan dari masyarakat Papua, Indonesia memilih 1.026 orang saja dari sekian juta orang Papua.

Kecurangan dalam proses ini kemudian memunculkan konflik vertikal. Konflik vertikal ini tidak hanya akibat dari proses PEPERA yang manipulatif tetapi juga karena problem lain yakni masalah marginalisasi dan pembangunan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat. Persoalan bertambah parah karena masing-masing aktor yang terlibat dalam konflik tersebut mengusung kepentingan yang berbeda. Akibatnya, konflik ini tidak kunjung terselesaikan, sementara para korban terus berjatuhan.

Bertolak dari problem di atas, penulis menawarkan gagasan etika diskursus Jürgen Habermas sebagai prosedur bagi pengelolaan konflik vertikal di Papua. Menurut Habermas berbagai kepentingan dan pandangan setiap pihak mesti didiskusikan secara terbuka agar setiap perbedaan dan kepentingan bisa dikelola dengan baik demi kemaslahatan bersama.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tulisan ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada semua pihak

yang dengan caranya masing-masing telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. *Pertama*, syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. *Kedua*, terima kasih yang berlimpah kepada Dr. Yosef Keladu sebagai dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan penuh perhatian membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi ini. *Ketiga*, terima kasih kepada Kristianto Ratu Marius Naben, S.Fil., M.A., sebagai dosen penguji yang telah memberikan banyak saran, koreksi, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini. *Keempat*, Prefek unit Yosef Freinademetz, P. Lambertus Lima Letu, SVD, P. Yohanes Dionisius Bosco Galus, SVD dan P. Puplius Meinrad Buru, SVD yang telah memotivasi penulis agar tetap semangat dalam penyelesaian tulisan skripsi ini. *Keempat*, lembaga formasi calon imam Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, yang telah memberikan ruang gerak dan fasilitas yang cukup mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. *Kelima*, seluruh dosen dan staf akademik IFTK Ledalero, yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman akademik yang sangat berharga selama masa studi penulis. Setiap mata kuliah, diskusi, serta interaksi dengan para dosen telah membentuk cara berpikir penulis dalam memahami berbagai konsep studi. *Keenam*, semua keluarga tercinta di Papua, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi saya.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan pengembangan penelitian di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Ledalero, 10 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Sebastianus Iyai. 21.75.7172. **Etika Diskursus Jürgen Habermas dan Relevansinya Bagi Penyelesaian Konflik Vertikal di Papua**. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Filsafat, Intitut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2025.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk (1) menelisik dan menjelaskan kontribusi etika diskursus Jürgen Habermas bagi pengelolaan konflik vertikal di Papua, (2) menjelaskan konsep Jürgen Habermas tentang etika diskursus, dan (3) mendeskripsikan realitas konflik vertikal di Papua.

Metode yang digunakan dalam pengerjaan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam hal ini penulis membuat kajian pustaka terhadap literatur-literatur yang mengulas mengenai konflik vertikal di Papua dan etika diskursus Jürgen Habermas.

Papua dilanda konflik vertikal sejak tahun 1963. Konflik vertikal ini terjadi karena adanya marginalisasi serta perbedaan kepentingan dan pendapat antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua. Menurut pemerintah pusat Papua adalah bagian utuh dari Indonesia, sementara menurut masyarakat Papua, Papua sendiri berada terpisah dari Indonesia. Masyarakat Papua menilai terdapat kegagalan dalam proses integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia karena proses integrasi tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang benar dan berjalan di bawah tekanan dari kekuasaan. Konflik antara Pemerintah Pusat (Jakarta) dan masyarakat Papua ini terus berlanjut sampai sekarang. Sejumlah langkah penyelesaian telah dibuat namun tidak kunjung membuahkan hasil yang positif.

Bertolak dari persoalan di atas, penulis menawarkan etika diskursus Jürgen Habermas sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan konflik vertikal di Papua. Etika diskursus Habermas menekankan komunikasi yang rasional dan argumentatif. Setiap perbedaan dan kepentingan harus dikomunikasikan secara terbuka. Komunikasi ini berlangsung tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Komunikasi yang terjadi di bawah tekanan, intimidasi, manipulasi dan rekayasa dianggap tidak sah. Menurut etika diskursus tujuan dari komunikasi adalah mencapai konsensus atau kesepakatan bersama dan dasar dari konsensus tersebut adalah argumentasi yang rasional dan disepakati bersama. Prinsip etika diskursus mengatakan bahwa norma dianggap sah apabila disepakati bersama. Bertolak dari prinsip itu, berbagai pandangan dan kepentingan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat harus dikomunikasikan secara bebas dan terbuka. Dalam komunikasi itu setiap partisipan harus memperhatikan klaim-klaim kesahihan seperti kejelasan, kebenaran, ketepatan dan kejujuran. Hal ini bertujuan agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan kesepakatan bersama, yang bisa menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Jürgen Habermas, etika diskursus, konflik vertikal di Papua.

ABSTRACT

Sebastianus Iyai, 21.75.7172. **The Ethics of Jürgen Habermas's Discourse and Its Relevance for Vertical Conflict Resolution in Papua.** Thesis. Bachelor's Program, Philosophy Study Program, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology, 2025.

The purpose of this thesis is to (1) examine and explain the contribution of Jürgen Habermas' discourse ethics to the management of vertical conflicts in Papua, (2) explain Jürgen Habermas' concept of discourse ethics, and (3) describe the reality of vertical conflict in Papua.

The method used in working on this thesis is a qualitative descriptive method. In this case, the author makes a literature review of literature that reviews vertical conflicts in Papua and the ethics of Jürgen Habermas' discourse.

Papua has been hit by vertical conflict since 1963. This vertical conflict occurs due to marginalization, differences in interests and opinions between the central government and the Papuan people. According to the central government, Papua is an integral part of Indonesia, while according to the Papuan people, Papua itself is separate from Indonesia. The Papuan people consider that there are irregularities in the process of integrating Papua into Indonesia because the integration process is not in accordance with the correct procedures and runs under pressure from power. Based on these claims, finally the conflict is increasingly fertile and widespread to this day. To end these vertical conflicts, the government has tried to offer and implement various approaches and policies. However, it seems that each of these approaches and policies has not solved the root of the problem in Papua.

Departing from the above problem, the author offers the ethics of Jürgen Habermas' discourse as one of the alternatives to stem vertical conflicts in Papua. In discourse ethics, it emphasizes rational and argumentative communication. Any differences and interests should be communicated openly. This communication continued without any pressure and coercion from any party. The communication that occurs is under pressure, intimidation, manipulation and manipulation is considered illegitimate. The purpose of communication is to reach a mutual agreement. The basis of consensus is rational and mutually agreed upon arguments. The ethical principle of discourse says that norms are considered valid if they are mutually agreed. Contrary to this principle, various views and interests between the Papuan people and the central government must be communicated freely and openly. The goal is that the two warring parties can come to a mutual agreement. In the communication, every pastor must pay attention to legitimate claims such as clarity, truthfulness, accuracy and honesty. This is so that communication can continue well. Thus, communication can generate rational and argumentative consensus.

Keywords: Jürgen Habermas, discourse ethics, vertical conflict in Papua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penulisan	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II KONFLIK VERTIKAL DI PAPUA	7
2.1 Definisi Konflik	7
2.2 Konflik Bersenjata di Papua.....	8
2.3 Faktor Utama Penyebab Konflik di Papua	12
2.3.1 Marginalisasi Penduduk Asli Papua.....	13

2.3.2 Integrasi Papua ke Dalam Indonesia yang Bermasalah.....	17
2.3.3 Pelanggaran Ham dan Kekerasan Militer di Papua.....	21
2.3.3.1 Fakta-Fakta Pelanggaran HAM di Papua	23
2.3.3.1.1 Pelanggaran HAM Sebelum Reformasi 1998 (Orde Baru)	23
2.3.3.1.2 Pelanggaran HAM Era Reformasi.....	24
2.3.3.1.3 Kasus Biak	25
2.3.3.1.4 Kasus Wasior.....	26
2.3.4 Kegagalan Pembangunan di Papua	27
2.3.4.1 Pendidikan	29
2.3.4.2 Kesehatan.....	31
BAB III JÜRGEN HABERMAS DAM DISKURSUS RASIONALITAS	
KOMUNIKATIF.....	33
3.1 Sekilas Tentang Jürgen Habermas	33
3.1.1 Biografi Jürgen Habermas	33
3.1.2 Beberapa Karya-Karya Intelektual Jürgen Habermas	35
3.1.2.1 <i>Between Fact and Normas: Contribution to a Discouse Theory</i> <i>of Law and Democracy</i>	36
3.1.2.2 <i>The Theory of Communicative Action: Reason and the</i> <i>Rationalization of Society, vol. 1</i>	36
3.1.2.3 <i>The Theory of Communicative Action: Life-world System, a Critique</i> <i>of Functionalist Reason, Vol. 2</i>	37
3.2 Latar Belakang Sejarah Perkembangan Gagasan Rasionalitas	
Komunikatif.	37
3.2.1 Pemahaman Konsep “Kritis” Kant, Hegel, dan Marx.....	39
3.2.1.1 Kritisme Kant.....	39
3.2.1.2 Dialektika Hegel.....	40
3.2.1.3 Kritik Ekonomi-Politik Karl Marx.....	41
3.2.2 Mazhab Frankfurt.....	43

3.2.3	Generasi Pertama Teori Kritis Mazhab Frankfurt Horkheimer, Adorno dan Marcuse	45
3.2.4	Jürgen Habermas Sebagai Pembaharu Mazhab Frankfurt.....	49
3.2.5	Kekuasaan Komunikasi: Hannah Arendt ke Jürgen Habermas	52
3.3	Pokok-Pokok Pemikiran Jürgen Habermas	53
3.3.1	Tindakan Komunikatif.....	53
3.3.1.1	Rasionalitas Instrumental dan Rasionalitas Komunikatif.....	53
3.3.1.2	<i>Lebenswelt</i> dan Sistem	54
3.3.1.3	Rasionalisasi <i>Lebenswelt</i>	55
3.4	Gagasan Rasionalitas Komunikatif	56
3.5	Gagasan Etika Diskursus.....	60
3.5.1	Teori Tindakan Komunikatif: Basis Epistemik Etika Diskursus	64
3.5.2	Klaim Kesahihan.....	65
BAB IV	ETIKA DISKURSUS JÜRGEN HABERMAS DAN PENYELESAIAN KONFLIK VERTIKAL DI PAPUA.....	66
4.1	<i>Lebenswelt</i> dan Realitas Konflik Vertikal di Papua	66
4.2	Etika Diskursus Sebagai Prosedural Mengatasi Konflik Vertikal di Papua.....	70
4.3	Relevansi Etika Diskursus Untuk Penyelesaian Konflik Vertikal di Papua	72
4.4	Pencarian Konsensus Melalui Rasionalitas Komunikatif.....	77
4.4.1	Penyelesaian Konflik di Papua Melalui Tindakan Komunikasi	80
4.4.2	Catatan Kritis	83
BAB V	PENUTUP.....	85
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA		88